



Postulat Entitas: Landasan Teori Akuntansi, Penerapan dalam Struktur Laporan Keuangan, dan Implikasi Bisnis

Olive Ondita Sibarani*, Sulastri Ladyana Samosir, Riska Harianingsih, Erik Martua Simatupang, Arif Anakampun, Jufri Darma

Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Medan

Abstrak: Postulat entitas (economic/entity assumption) merupakan salah satu prinsip dasar dalam akuntansi yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi perusahaan harus dipisahkan secara tegas dari aktivitas ekonomi pemilik, afiliasi, maupun pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan entitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan teoretis postulat entitas, membedakannya dari konsep entitas hukum, serta menganalisis penerapannya dalam struktur pelaporan keuangan modern berdasarkan standar IFRS dan FASB. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah literatur primer seperti Conceptual Framework for Financial Reporting (IFRS Foundation), Accounting Standards Codification (FASB), serta penelitian empiris terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa postulat entitas berperan penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keandalan pelaporan keuangan, sekaligus memengaruhi tata kelola, kepatuhan regulasi, akurasi penilaian perusahaan, dan pengurangan risiko manipulasi laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan postulat entitas mampu memperkuat kualitas pelaporan keuangan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan.

Kata kunci: Postulat Entitas, Entitas Hukum, IFRS, Pelaporan Keuangan, Transparansi, Tata Kelola Perusahaan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3303>

*Correspondence: Olive Ondita Sibarani

Email: oliveonditasibarani@gmail.com

Received: 19-11-2025

Accepted: 10-12-2025

Published: 11-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The entity postulate (economic/entity assumption) is a fundamental principle in accounting that requires a company's economic activities to be strictly separated from those of its owners, affiliates, or unrelated external parties. This paper aims to examine the theoretical foundations of the entity postulate, differentiate it from the concept of a legal entity, and analyze its application within modern financial reporting structures based on IFRS and FASB standards. The study employs a descriptive qualitative approach by reviewing primary literature including the Conceptual Framework for Financial Reporting (IFRS Foundation), the Accounting Standards Codification (FASB), and recent empirical studies. The findings indicate that the entity postulate plays an essential role in ensuring accountability, transparency, and reliability in financial reporting, while also influencing governance, regulatory compliance, valuation accuracy, and the mitigation of manipulation risks. The study concludes that although the entity postulate significantly strengthens the quality of financial reporting, its practical implementation still faces notable challenges across various business contexts.

Keywords: Entity Assumption, Legal Entity, IFRS, Financial Reporting, Transparency, Corporate Governance

Pendahuluan

Postulat akuntansi adalah seperangkat asumsi dasar yang diterima sebagai kebenaran dan dijadikan landasan utama dalam proses penyusunan laporan keuangan. Asumsi-asumsi ini terbentuk dari praktik akuntansi yang berkembang secara historis dan menjadi pedoman yang harus diikuti dalam penyajian informasi keuangan (Ervina et al., 2022). Entitas (kesatuan usaha) merupakan konsep yang paling mendasar dalam akuntansi (Ismail et al., 2023). Konsep ini memungkinkan akuntan untuk membedakan antara transaksi yang benar-benar terkait dengan entitas dan transaksi yang terkait dengan pemilik atau pihak di luar entitas. Misalnya, aktivitas pribadi pemilik tidak dicampur dalam laporan keuangan entitas. Hal ini penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha entitas secara benar, bukan campuran kepentingan pribadi (Lakisa et al., 2025; Monoarfa et al., 2024)

Asumsi entitas (*economic entity assumption*) merupakan bagian penting dari kerangka konseptual akuntansi modern karena menetapkan batasan objek yang dicatat dan dilaporkan (Harrison, 2018; Hoss, 2020). Postulat entitas menjadi penting karena tanpa adanya pemisahan yang tegas antara entitas dan pemilik, informasi dalam laporan keuangan akan kehilangan objektivitas dan relevansi. Dengan menganggap entitas sebagai satu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri, akuntansi dapat menyediakan gambaran yang wajar (*fair presentation*) tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas entitas. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas yang seluruhnya memusatkan perhatian pada kondisi ekonomi entitas, bukan individu yang mengelolanya.

Menurut studi terbaru, masalah dalam melaksanakan prinsip dasar akuntansi, termasuk entitas, sering menjadi penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan. Hal ini menunjukkan bahwa regulator perlu memiliki strategi yang tepat dan mudah disesuaikan untuk memastikan laporan tetap transparan dan akuntabel Febby Kusuma Wardani^{1*}, (2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan teoretis postulat entitas serta menganalisis penerapannya dalam struktur laporan keuangan modern beserta implikasinya terhadap praktik bisnis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menelaah dan mengkaji konsep postulat entitas sebagai landasan teori akuntansi, penerapannya dalam struktur laporan keuangan, serta implikasi bisnisnya berdasarkan teori, standar akuntansi, dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Kadek et al. (2019) studi literatur merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap suatu topik ilmiah (Krippendorff, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Landasan Teori Akuntansi

Postulat entitas atau *economic/entity assumption* merupakan salah satu asumsi dasar akuntansi yang menegaskan bahwa suatu organisasi ekonomi harus diperlakukan sebagai unit yang terpisah (*distinct unit*) dari pemilik, pengelola, maupun pihak lain di luar entitas tersebut. Menurut Suwardjono (2016) entitas usaha harus dipandang sebagai unit ekonomi tersendiri sehingga laporan keuangan menggambarkan posisi dan kinerja entitas, bukan pemiliknya. Sejalan dengan itu, Warren et al. (2018) menjelaskan bahwa kegiatan bisnis harus dicatat terpisah dari kegiatan pribadi pemilik maupun entitas lain. Belkaoui (2011) juga menegaskan bahwa perusahaan adalah unit yang berdiri sendiri dan berbeda dari pemiliknya, sedangkan Horngren et al., (2012) menambahkan bahwa catatan akuntansi entitas tidak boleh mencakup aset maupun kewajiban pribadi pemilik. Kieso et al. (2020) menyatakan bahwa kegiatan ekonomi dapat diidentifikasi dengan satu unit akuntabilitas tertentu, sementara Belkaoui & Jones (2006) menegaskan laporan akuntansi harus disusun untuk entitas, bukan pemiliknya. Senada dengan itu, Hendriksen & Breda (1992) menyebut konsep entitas sebagai dasar penting dalam memandang perusahaan sebagai unit yang terpisah dari pemiliknya agar kinerja dapat diukur secara objektif. Dengan demikian, postulat entitas menjadi landasan penting bagi penyusunan laporan keuangan yang objektif, andal, dan mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara sebenarnya. Dengan kata lain, akuntansi hanya mencatat transaksi dan kejadian ekonomi yang berkaitan dengan entitas yang bersangkutan, bukan dengan individu pemilik atau afiliasi lain. Dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan oleh IFRS Foundation (2018), konsep entitas ekonomi ini menjadi dasar dalam menentukan "reporting entity", yaitu unit yang laporan keuangannya ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan dan kinerja secara terpisah dari pemilik atau pihak lain.

Postulat entitas berakar dari teori entitas (*entity theory*) dalam akuntansi, yang menempatkan perusahaan sebagai subjek ekonomi yang berdiri sendiri, bukan sekadar alat pemilik untuk mencapai tujuan pribadi. Dalam teori ini, laba yang dihasilkan entitas bukan milik pemilik secara langsung, melainkan merupakan hasil operasi entitas yang akan dibagikan kepada pemilik hanya setelah melalui proses distribusi resmi (misalnya, dividen). Konsep ini berlawanan dengan teori *proprietorship*, yang memandang bisnis sebagai perpanjangan tangan dari pemilik, di mana aset dan kewajiban entitas dipandang sebagai milik pribadi. Perkembangan akuntansi modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan *proprietorship* ke pendekatan *entity theory*, seiring meningkatnya kompleksitas struktur bisnis dan kebutuhan akuntabilitas publik. Selain teori entitas dan *proprietorship*, postulat entitas juga memiliki hubungan dengan teori lain, yaitu (1) *Enterprise Theory*, yang melihat entitas sebagai lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya pemilik modal (2) *Command Accountability Theory*, yang menekankan bahwa akuntansi harus menyediakan informasi yang memungkinkan pemegang kendali (manajemen, regulator, pemegang saham) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya entitas.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Temuan Utama | Relevansi dengan Topik |
|----|---------------------------|--|---|--|--|
| 1. | Salampessy et al., (2023) | <i>Menyelami Konsep Kesatuan Usaha dalam Teori-Akuntansi</i> | Kajian teoretis mengenai kesatuan usaha (entity concept) dalam teori akuntansi. | Postulat entitas menegaskan pemisahan aktivitas ekonomi entitas dari pemilik; penting untuk menjaga objektivitas dan keandalan laporan keuangan. | Memberikan dasar teoretis kuat tentang pentingnya pemisahan entitas dan pemilik dalam pelaporan keuangan. |
| 2. | Triyuwono (2003) | <i>Konsekuensi Penggunaan Entity Theory sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syariah</i> | Analisis konsekuensi nilai dari penerapan teori entitas pada akuntansi syariah. | Penggunaan teori entitas dapat menimbulkan nilai kapitalistik dan utilitarian; memengaruhi aspek etika dan spiritual pelaporan. | Menunjukkan implikasi nilai dan tata kelola bisnis dari penerapan postulat entitas. |
| 3. | Stadler & Nobes, (2025) | <i>Varied international practice in accounting for extractive activities</i> | Variasi praktik akuntansi pada industri ekstraktif di berbagai negara dan dampaknya pada komparabilitas laporan keuangan. | Praktik pelaporan antarnegara tidak seragam; Kebijakan dipengaruhi regulasi nasional; Komparabilitas rendah; Perlunya pemisahan entitas yang jelas | Menegaskan pentingnya pemisahan aktivitas entitas dari pihak eksternal, penguatan akuntabilitas, harmonisasi IFRS, serta dampaknya terhadap transparansi dan keputusan bisnis. |

Pembahasan

Penerapan dalam Struktur Laporan Keuangan

Dalam praktik pelaporan keuangan, postulat entitas berfungsi sebagai dasar penentuan batas pelaporan (reporting boundary), yaitu sejauh mana transaksi harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. PSAK 1 (Revisi 2023) menegaskan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan posisi keuangan entitas pelapor secara individual tanpa mencampur dengan kepentingan pihak pemilik atau entitas lain yang tidak memiliki

hubungan pengendalian. Postulat entitas juga berperan penting dalam (1) Pemisahan transaksi pribadi dan bisnis, terutama dalam entitas perseorangan dan UMKM (2) Penyusunan laporan konsolidasi, di mana entitas induk dan anak dianggap satu unit ekonomi (3) Penentuan kewajiban pajak dan audit, karena hanya transaksi entitas yang menjadi dasar perhitungan pajak dan pemeriksaan. Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa pemahaman yang lemah terhadap postulat entitas dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, penghindaran pajak, dan menurunnya transparansi laporan keuangan (Chen & Chen, 2009).

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Dengan menggunakan postulat entitas, laporan posisi keuangan menyajikan aset dan liabilitas milik entitas pelapor, bukan aset pribadi pemilik atau pihak luar entitas. Dalam praktik, ini berarti bahwa aset yang secara ekonomis dikuasai oleh entitas harus diakui sebagai bagian dari neraca, sedangkan transaksi pribadi pemilik tidak boleh dicampurkan. Salah satu sumber praktik menyebut bahwa unit pelaporan harus dianggap sebagai "*single economic entity*" ketika mengkonsolidasikan anak perusahaan. Namun, dalam praktik muncul isu-isu kompleks seperti transaksi antar-entitas, hak kepemilikan ekonomi yang tidak jelas atau pengakuan aset bersyarat yang menuntut pertimbangan entitas apakah termasuk dalam lingkup pelaporan. Standar pelaporan konsolidasi memberikan pedoman untuk eliminasi transaksi antar-entitas agar tidak terjadi duplikasi aset atau liabilitas dalam laporan kelompok.

2. Laporan Laba Rugi dan Pengukuran Kinerja

Dalam laporan laba rugi, postulat entitas mengharuskan bahwa pendapatan dan beban yang dilaporkan mencerminkan aktivitas ekonomi entitas pelapor bukan pemilik atau entitas afiliasi yang tidak termasuk unit pelaporan. Misalnya jika entitas anak beroperasi rugi, metode akuntansi seperti metode ekuitas atau konsolidasi penuh akan memengaruhi laba kelompok dan pengungkapan ke pemangku kepentingan. Penerapan standar konsolidasi seperti IFRS 10 menegaskan bahwa entitas yang dikendalikan harus dikonsolidasikan ke dalam kelompok sebagai satu kesatuan ekonomi. Akibatnya, kinerja entitas dan pemilik harus dipisahkan agar laporan tidak menyesatkan

3. Laporan Arus Kas dan Pengungkapan

Laporan arus kas juga merefleksikan aktivitas kas entitas pelapor penerimaan dan pengeluaran kas yang secara nyata merupakan bagian dari entitas. Pengungkapan transaksi antar-entitas, transaksi non-kas, serta komitmen pihak terkait menjadi penting demi transparansi ekonomi unit pelaporan. Selain itu, konsep entitas mempengaruhi bagaimana nilai wajar atau harga keluar dipertimbangkan apakah berdasarkan asumsi entitas-spesifik atau perspektif pelaku pasar (market participant) karena batas entitas menentukan siapa yang "menguasai" aset atau liabilitas tersebut.

4. Konsolidasi dan Pengelolaan Grup

Dalam konteks grup perusahaan, penerapan postulat entitas menuntut identifikasi yang tepat atas unit pelaporan yang akan dikonsolidasikan. Standar konsolidasi seperti IFRS 10 mengedepankan konsep pengendalian ekonomi yaitu

kekuasaan atas investee, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Ketidakjelasan identifikasi seperti dalam entitas kepentingan variabel (VIE) dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam angka pelaporan dan penyajian keuangan kelompok. Ini menunjukkan penerapan nyata dari postulat entitas dalam konteks pelaporan grup.

Implikasi Penerapan Postulat Entitas

Penerapan postulat entitas memiliki implikasi bisnis yang luas terhadap tata kelola, kepatuhan, penilaian perusahaan, dan kualitas pelaporan keuangan. Pemisahan entitas secara jelas memperkuat akuntabilitas manajerial dan mekanisme tata kelola karena kinerja setiap unit dapat diukur serta diaudit secara independen, sehingga meningkatkan transparansi bagi pemangku kepentingan. Namun, ketika batas antarentitas kabur misalnya melalui transaksi afiliasi yang tidak wajar atau kepemilikan silang (*interlocking directorates*) kepercayaan investor dapat menurun karena sulit menilai kinerja dan risiko secara objektif (ScholasticaHQ, 2023). Dari sisi kepatuhan hukum dan perpajakan, penerapan postulat entitas juga menjadi dasar dalam menentukan kewajiban pajak, tanggung jawab hukum, serta pembatasan liability; kesalahan penerapan seperti pencampuran transaksi pemilik dengan entitas dapat memunculkan risiko hukum dan sanksi pajak. Selain itu, pemisahan unit pelaporan menjadi penting dalam konteks penilaian perusahaan dan pengambilan keputusan manajerial, seperti pada aktivitas merger dan akuisisi (M&A), restrukturisasi, dan spin-off, karena perbedaan pengakuan entitas dapat memengaruhi indikator keuangan utama seperti leverage, ROE, dan EBITDA. Meski demikian, postulat entitas juga menghadirkan tantangan ketika dimanfaatkan secara tidak etis melalui transaksi antar-entitas untuk memindahkan laba atau menutupi risiko. Praktik *earnings management* dan pembentukan *special purpose entities* tanpa pengungkapan memadai dapat mereduksi kualitas laporan keuangan dan mengaburkan kondisi ekonomi sebenarnya. Oleh karena itu, penerapan postulat entitas yang konsisten dan transparan memerlukan pengawasan regulasi serta audit yang ketat terhadap hubungan pihak terkait guna menjaga integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan (Li et al., 2021).

Hasil telaah literatur menunjukkan sejumlah temuan utama sekaligus celah penelitian yang masih terbuka terkait penerapan postulat entitas dalam praktik pelaporan keuangan. Pertama, dari sisi konsistensi kerangka konseptual, standar internasional seperti IFRS dan FASB telah memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk mendefinisikan batas unit pelaporan. Namun, penerapan praktisnya masih menghadapi tantangan, terutama dalam kasus entitas yang kompleks seperti *Variable Interest Entities (VIE)*, *Special Purpose Vehicles (SPV)*, dan struktur grup lintas yurisdiksi. Perbedaan dalam interpretasi pengendalian ekonomi menyebabkan inkonsistensi dalam konsolidasi laporan keuangan antarnegara dan antarstandar.

Kedua, isu transparansi transaksi antar-entitas (*intercompany transactions*) masih menjadi perhatian utama dalam literatur empiris. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan pihak berelasi yang tidak memadai dapat menimbulkan distorsi dalam

penilaian risiko dan keputusan investasi. Kelemahan dalam pelaporan transaksi afiliasi juga berpotensi dimanfaatkan untuk earnings management atau pengalihan laba antarunit, yang pada akhirnya menurunkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan investor (Li et al., 2021). Oleh karena itu, para peneliti menekankan perlunya penguatan standar audit dan mekanisme pengungkapan yang lebih transparan terhadap transaksi antar-entitas.

Ketiga, dari perspektif konteks lokal Indonesia, beberapa studi dan skripsi yang ditelusuri melalui repository universitas menunjukkan adanya variasi penerapan postulat entitas akibat perbedaan praktik bisnis, kompleksitas regulasi, serta kapasitas pelaporan entitas non-publik. Banyak entitas skala kecil hingga menengah belum sepenuhnya menerapkan prinsip pemisahan entitas secara konsisten, terutama pasca-adopsi PSAK berbasis IFRS. Hal ini menunjukkan masih besarnya kebutuhan penelitian empiris berskala nasional untuk mengukur tingkat kepatuhan dan pemahaman praktisi akuntansi terhadap konsep entitas ekonomi (Adolph, 2016).

Keempat, dari sisi metodologis, sebagian besar penelitian terdahulu bersifat konseptual atau berbasis studi kasus tunggal, yang membatasi generalisasi temuan. Masih diperlukan kajian empiris kuantitatif lintas-negara untuk menguji bagaimana perbedaan identifikasi entitas pelaporan dapat memengaruhi metrik pasar seperti nilai perusahaan, earnings quality, dan keputusan manajerial strategis (Clinch et al., 2023). Dengan demikian, terdapat peluang riset yang luas untuk mengintegrasikan pendekatan teoritis, regulatif, dan empiris guna memperkuat pemahaman terhadap penerapan postulat entitas di berbagai konteks bisnis dan sistem pelaporan yang berbeda.

Studi Kasus

Dalam akuntansi, postulat entitas (entity assumption) menegaskan bahwa perusahaan harus dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemilik, manajemen, maupun entitas lain (Kieso et al., 2020; Suwardjono, 2016). Penerapan postulat ini memungkinkan laporan keuangan merefleksikan kondisi ekonomi perusahaan secara objektif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang melanggar prinsip ini dengan mencampur transaksi pribadi dan entitas, salah satunya adalah Adelphia Communications Corporation, sebuah perusahaan kabel besar di Amerika Serikat. Kasus Adelphia Communications Corporation menjadi salah satu skandal akuntansi terbesar di Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an. Berdasarkan laporan U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) (2002), keluarga pendiri perusahaan, yaitu keluarga Rigas, menggunakan aset dan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian properti dan pembayaran utang pribadi. Transaksi-transaksi tersebut disamarkan melalui serangkaian entitas afiliasi yang seolah-olah berdiri sendiri, padahal dikendalikan oleh pihak yang sama (Integrity, 2023).

Perilaku ini jelas melanggar postulat entitas, karena laporan keuangan tidak lagi merepresentasikan aktivitas ekonomi perusahaan sebagai satu kesatuan yang terpisah dari pemiliknya. Menurut Belkaoui (2011), pelanggaran terhadap postulat entitas menyebabkan informasi keuangan kehilangan relevansi dan reliabilitasnya. Dalam kasus Adelphia, praktik menyembunyikan utang antar entitas afiliasi juga menimbulkan manipulasi data

akuntansi yang signifikan, hingga akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan pada tahun 2002. Penelitian oleh Khan dan Rauf menyebutkan bahwa skandal Adelphia memperlihatkan lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip entitas ekonomi, yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan (Khan & Rauf, 2022).

Simpulan

Postulat entitas merupakan fondasi penting dalam sistem akuntansi modern karena memastikan bahwa laporan keuangan hanya mencerminkan aktivitas ekonomi entitas yang dilaporkan, bukan kepentingan pribadi pemilik atau afiliasi lainnya. Pemisahan yang tegas antara entitas hukum dan entitas akuntansi menciptakan dasar bagi pelaporan yang objektif, dapat diaudit, dan relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Penerapan postulat entitas berimplikasi besar terhadap tata kelola, transparansi, dan integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, praktik terbaik yang perlu dikedepankan adalah penegakan kebijakan dokumentasi transaksi antar-entitas, pengungkapan pihak terkait yang komprehensif, serta konsistensi penerapan pedoman konsolidasi berbasis pengendalian ekonomi. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji secara empiris dampak penerapan postulat entitas terhadap nilai perusahaan, persepsi investor, serta kualitas pelaporan di berbagai konteks regulasi, termasuk di Indonesia, guna memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan sistem pelaporan keuangan global.

Referensi

- Adolph, R. (2016). *Teori Akuntansi*. [https://repository.usahid.ac.id/2317/1/buku TEORI AKUNTANSI2.pdf](https://repository.usahid.ac.id/2317/1/buku%20TEORI%20AKUNTANSI2.pdf)
- Belkaoui, A. R. (2011). *Accounting Theory*. Cengage Learning.
- Belkaoui, A. R., & Jones, S. (2006). *Accounting Theory (European Edition)*. Thomson Learning.
- Chen, M., & Chen, R. D. (2009). Economic Entity Theory: Non-Controlling Interests and Goodwill Valuation. *Journal of Finance and Accountancy*, 1, 1–9.
- Clinch, G., Tarca, A., & Wee, M. (2023). Cross-country diversity and non-IFRS financial performance measures. *Accounting and Finance*, 63(2), 2473–2502. <https://doi.org/10.1111/acfi.12980>
- Ervina, N., Zuhra, S., Werastuti, D. N. S., Amani, T., Agustina, P. A. A., Wahidahwati, Tenriwaru, Rohmatunnisa, L. D., Murniatu, A., Suharsono, R. S., Saleh, L., Hanafie, H., & Dura, J. (2022). *Teori Akuntansi* (S. Bahri (ed.)). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Febby Kusuma Wardani1*, B. E. W. (2022). Prinsip Dasar dan Konsep Dasar Akuntansi. *Asian Journal of Management Analytics (AJMA)*, 2 No.2, 125–136. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i2.1485>

- Harrison, W. T. (2018). *Conceptual Framework and Financial Statement*. 1–57.
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. V. (1992). *Accounting Theory*. IL: Irwin.
- Hornngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2012). *Accounting* (9th ed.). NJ: Pearson Education.
- Hoss, E. (2020). *Concept of entity assumption*. IGCSE Accounts. <https://www.igcseaccounts.com>
- Integrity, F. (2023). *The Fall of Adelpia Communications: A Study in Corporate Fraud*. <https://integrityforensic.com/the-fall-of-adelpia-communications-a-study-in-corporate-fraud/>
- Ismail, N., Marselina, A., Nggalo, M. M., & Irmawati, I. (2023). *Implementasi Konsep Entitas Terpisah Umkm Dalam Penetapan Laba Usaha (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan)*. 8(2), 235–253.
- Kadek, I., Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, G., & Aristia Prayudi, M. (2019). Analisis Penerapan Konsep Kesatuan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(4), 45–56.
- Khan, R., & Rauf, A. (2022). Corporate scandals and financial reporting: Lessons from Adelpia case. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(7), 55–62. <https://iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/61927>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting* (17th ed.). NJ: John Wiley & Sons.
- Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Lakisa, F., Tuli, H., & Mahmud, M. (2025). Analisis Implementasi Konsep Entitas Pada Laporan Keuangan EMKM (Studi Pada Rumah Makan Langgeng Sari. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 8(1), 42–75.
- Li, J., Xia, T., & Wu, D. (2021). Internal Control Quality, Related Party Transactions and Accounting Information Comparability. *Procedia Computer Science*, 199, 1252–1259. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.159>
- Monoarfa, A. R., Tuli, H., & Lukum, A. (2024). Penerapan Konsep Entitas dalam Mengidentifikasi Perkembangan Usaha Mikro Sektor Barang Ritel. *Jambura Accounting Review*, 5(2), 242 – 255.

-
- Salampeppy, Z., Junferstina, M., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2023). MENYELAMI KONSEP KESATUAN USAHA DALAM TEORI-TEORI AKUNTANSI. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1), 218–224.
- Stadler, C., & Nobes, C. (2025). Varied international practice in accounting for extractive activities. *Accounting and Business Research*, 55(6), 605–638. <https://doi.org/10.1080/00014788.2024.2381503>
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE.
- Triyuwono, I. (2003). Konsekuensi Penggunaan Entity Theory Sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syariah. *Jaai*, 7(1), 37–52. <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/849>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. E. (2018). *Accounting* (27 Th (ed.)). MA: Cengage Learning.